



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG
NOMOR : KEP- 30/M.2.10/Cs.1/06/2024

TENTANG

TIM PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dengan tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
- b. bahwa untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagai dimaksud dalam huruf a perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Kota Bandung.
- c. bahwa untuk optimalisasi sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Tim Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 4 Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- 5 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Pakta Integritas dilingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 8 Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-004/A/JA/03/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Road Map Reformasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019
- 9 Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung R.I.
- 10 Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN PEJABAT/PEGAWAI SEBAGAI TIM PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP).
- KESATU : Terhitung mulai tanggal menunjuk sebagai Tim Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kejaksaan Negeri Kota Bandung.
- KEDUA : Segera melaksanakan tugas tambahan selain daripada Tugas Pokok yang telah ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang dalam rangka mendorong optimalisasi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) di Kejaksaan Negeri Kota Bandung.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di B a n d u n g
pada tanggal 13 Juni 2024



Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung,



IRFAN WIBOWO

Jaksa Utama Pratama NIP. 19771021 200212 1 002

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG

NOMOR : KEP- 30/M.2.10/Cs.2/06/2024
TANGGAL : 13 Juni 2024

No.	Nama / Pangkat / NIP / NRP / Jabatan	Jabatan Dalam Tim Penyelenggaraan SAKIP
1.	IRFAN WIBOWO Jaksa Utama Pratama / (IV/b) NIP. 19771021 200212 1 002 NRP. 60377418 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG	Ketua
2.	Cardiana Harahap, S.H., M.H. Jaksa Madya / (IV/a) NIP. 19831222 200603 2 001 NRP. 60683016 KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN	Sekretaris
3.	Wawan Setiawan, SH. Jaksa Madya / (IV/a) NIP. 19800606 200501 1 004 NRP. 60580114 KEPALA SEKSI INTELIJEN	Anggota
4.	Ridha Nurul Ihsan, S.H. Jaksa Muda / (III/d) NIP. 19830622 200812 1 001 NRP. 60983549 KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS	Anggota
5.	Tumpal H. Sitompul, S.H. M.H. Jaksa Madya / (IV/a) NIP. 19810519 200812 1 001 NRP. 600981571 KASI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	Anggota
6.	Suparman, S.H.M.H. Jaksa Madya / (IV/a) NIP. 19661015 199003 1 003 NRP. 4906912 KEPALA SEKSI PB3R	Anggota
7.	Hendy Heryadi, S.E. S.H. Madya Wira / (III/c) NIP. 19790425 200501 1 002 NRP. 40579353 KAUR KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN DAN PNPB	Anggota
8.	Fernando Roy Andersen Purba., S.H. Madya Wira / (III/c) NIP. 19780211 200312 1 002 NRP. 4048148 KAUR PERLENGKAPAN	Anggota
9.	Bambang Halilintar K., S.H. Madya Wira / (III/c) NIP. 19771028 200501 1 008 NRP. 40577526 KAUR TATA USAHA DAN PERPUSTAKAAN	Anggota
10.	Boby Herlambang, S.H. MH. Ajun Jaksa / (III/b) NIP. 19920512 201801 1 002 NRP. 61893521 KASUBSI IPPKSBK DAN TIP INTEL DAN PENKUM	Anggota
11.	Christian Dior P. Sianturi, S.H. Ajun Jaksa / (III/b) NIP. 19910918 201801 1 001 NRP. 6189114 KASUBSI PRA PENUNTUTAN TINDAK PIDANA UMUM	Anggota

12.	Yadi Kurniawan, S.H. Jaksa Pratama / (III/c) NIP. 19830707 200501 1 004 NRP. 40583438 KASUBSI PENUNTUTAN EKSEKUSI DAN EKSAMINASI	Anggota
13.	Andi Tyas Tri Wibowo, S.H. Jaksa Pratama / (III/c) NIP. 19880321 201403 1 002 NRP. 61488433 KASUBSI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KHUSUS	Anggota
14.	Imam Muslihat Cakra Werdaya, S.H. Ajun Jaksa / (III/b) NIP. 19950331 201801 1 002 NRP. 6189541 KASUBSI PENUNTUTAN UPAYA HUKUM LUAR BIASA DAN EKSEKUSI TINDAK PIDANA KHUSUS	Anggota
15.	Rizki Budi Wibawa, S.H. Ajun Jaksa / (III/b) NIP. 19930527 201801 1 002 NRP. 61893441 KASUBSI PERTIMBANGAN HUKUM	Anggota
16.	Eli Asrianti Yuana Wira / (III/a) NIP. 19800424 200212 2 002 NRP. 403899380 PRANATA KOMPUTER PRATAMA	Anggota
17.	Evie Andreani, A.Md. Muda Wira / (III/b) NIP. 19790316 199903 2 002 NRP. 49979312 PRANATA KOMPUTER PRATAMA	Anggota
18.	Ida Rochyani, S.H. MUDA WIRA / (III/b) NIP. 19760610 200003 2 001 NRP. 40076120 FUNGSIONAL ANALIS SDM APARATUR AHLI PERTAMA	Anggota
19.	Novita Marthen, S.H. Muda Wira / (III/b) NIP. 19830316 200604 2 001 NRP. 40683409 FUNGSIONAL AUDITOR PERTAMA	Anggota
20.	Wiwin Putri Gurning, S.Kom Yuana Wira / (III/a) NIP. 19980901 202203 2 004 NRP. 622981158 ANALIS SISTEM INFORMASI	Anggota


 Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung,

IRFAN WIBOWO
 Jaksa Utama Pratama NIP. 19771021 200212 1 002